

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,75 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,59 persen; kelompok

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,11 persen; kelompok transportasi sebesar 0,48 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,18 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,61 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,87 persen. Sementara itu, terjadi kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yang turun sebesar 0,25 persen. Beberapa komoditas memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y pada Oktober 2025. Kenaikan harga beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, ikan segar, tomat, kelapa, santan jadi, kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sewa rumah, bahan bakar rumah tangga, tarif air minum PAM, upah asisten rumah tangga, mobil, uang kuliah akademi/PT, dan emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi pada periode ini. Sementara itu, sejumlah komoditas memberikan andil terhadap deflasi y-on-y, antara lain: bawang putih, cabai rawit, daging babi, sabun detergen bubuk, sabun cair/ cuci piring, detergen cair, pengharum cucian/ pelembut, tarif angkutan udara, tarif kereta api, telepon seluler, dan uang sekolah SMA. Kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi m-to-m pada Oktober 2025. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, jeruk, sigaret kretek mesin (SKM), emas perhiasan, tarif angkutan udara, dan uang kuliah akademi/PT. Sementara itu, beberapa komoditas justru memberikan andil terhadap deflasi m-to-m, antara lain: bawang merah, cabai rawit, tomat, beras, kacang panjang, cabai hijau, terong, dan jengkol. Pada Oktober 2025, sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil terhadap terjadinya inflasi y-on-y. Kelompok yang memberikan kontribusi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,43 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,77 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen. Selain itu, kenaikan harga juga tercermin pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil sebesar 0,16 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,07 persen, serta kelompok kesehatan dan kelompok transportasi yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,06 persen. Kenaikan lebih kecil juga tercatat pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang memberikan andil terhadap deflasi y-on-y, yaitu sebesar 0,01 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

A. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Komoditas penyumbang inflasi utama (beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah) masih sangat tergantung pasokan dari luar Kabupaten Dharmasraya.

2. Gangguan produksi atau distribusi di daerah pemasok langsung berdampak pada lonjakan harga lokal.

Permasalahan: Kemandirian pangan daerah masih rendah, sehingga rentan terhadap shock pasokan.

B. Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura

1. Cabai dan bawang menunjukkan “volatilitas harga tinggi” sepanjang Oktober-Desember 2025.
2. Dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim tanam, dan keterbatasan pasokan lokal.

Permasalahan: Belum optimalnya manajemen produksi dan distribusi hortikultura strategis.

C. Tekanan Inflasi Musiman Akhir Tahun

1. Peningkatan permintaan pada Desember 2025 (HBKN Nataru) mendorong kenaikan harga: Bahan makanan, Transportasi, Akomodasi dan jasa
2. Lonjakan permintaan tidak sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan pasokan.

Permasalahan: Langkah antisipatif inflasi musiman belum cukup kuat dan terencana sejak awal triwulan.

D. Distribusi dan Biaya Transportasi

1. Kenaikan biaya distribusi akibat jarak pasok, kondisi infrastruktur, dan biaya BBM turut memengaruhi harga barang konsumsi.
2. Terutama berdampak pada komoditas pangan segar.

Permasalahan: Efisiensi rantai pasok dan logistik pangan masih rendah.

E. Keterbatasan Intervensi Pasar yang Tepat Waktu

1. Operasi pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) belum sepenuhnya berbasis pada “early warning system” inflasi.
2. Intervensi cenderung reaktif saat harga sudah tinggi.

Permasalahan: Pengendalian inflasi belum sepenuhnya berbasis data prediktif dan analisis tren.

F. Koordinasi dan Konsistensi Pengendalian Inflasi Daerah

1. Walaupun TPID aktif, “sinkronisasi antar perangkat daerah” dalam pengendalian inflasi pangan masih perlu diperkuat.
2. Belum semua OPD menjadikan pengendalian inflasi sebagai prioritas lintas sektor.

Permasalahan: Koordinasi pengendalian inflasi belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan.

G. Keterbatasan anggaran

Anggaran secara umum menjadi kendala yang mempengaruhi setiap kebijakan termasuk kebijakan pengendalian inflasi. Dalam oprasional pelaksanaan pengendalian infalasi di Kabaupten Dharmasraya dibutuhkan anggaran yang memadai. Anggaran yang terbatas mengakibatkan pengendalian harga komoditas pangan menjadi tidak maksimal. OPD terkait yang melaksanakan kebijakan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara kontinyu di beberapa lokasi lain di kabupaten. Intervensi ini bertujuan secara langsung menstabilkan harga pangan pokok dan memastikan pasokan menjangkau masyarakat dengan harga terjangkau, sehingga mendukung strategi inflasi dari sisi penawaran dan daya beli.
2. Pencatatan harga pangan harian. Untuk mengetahui perkembangan harga harian, sehinggaantisipasi atas kenaikan harga yang berlebihan dapat ditanggulangi lebih awal untuk kenaikan harga yang lebih tinggi.
3. Rapat koordinasi inflasi nasional secara mingguan melalui Zoom. Kegiatan ini di ikuti oleh OPD terkait. Informasi terkini terkait dengan perkembangan harga nasional dapat dijadikan cerminan pemerintah daerah terakait dengan harga yangterjadi. Penyebab fluktuasi harga yang disampaikan dapat mempengaruhi arah kebijakan menjadi lebih tepat untuk mengendalikan harga

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pada Triwulan IV Tahun 2025, Kabupaten Dharmasraya menghadapi tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor musiman akhir tahun, fluktuasi harga pangan strategis, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.

Ruang lingkup evaluasi mencakup perkembangan inflasi bulan Oktober, November, dan Desember 2025 serta pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya intervensi pasar dan koordinasi TPID. Pada Triwulan IV Tahun 2025, inflasi Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren relatif meningkat dan stabil pada level menengah-tinggi. Inflasi dipengaruhi oleh:

Kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

- Peningkatan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal dan Tahun Baru).
- Faktor distribusi dan pasokan komoditas pangan strategis.

Secara umum, tekanan inflasi pada Triwulan IV bersifat musiman namun memerlukan intervensi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memperkuat produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
2. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan Gerakan Pangan Murah, terutama pada periode rawan inflasi.
3. Mengembangkan sistem pemantauan harga berbasis data dan prediksi.
4. Memperkuat peran TPID melalui sinergi lintas sektor yang lebih intensif.